

## **TREN URBANISASI PADA *SECONDARY CITIES* DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1990-2010<sup>1</sup>**

### **(*URBANIZATION TREND IN INDONESIA'S SECONDARY CITY, 1990-2010*)**

**Luh Kitty Katherina**

Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Korespondensi Penulis: *kittykatherina@gmail.com*

#### ***Abstract***

*Urbanization is identical to the main city in the country as a location of the capital accumulation that is the main attraction of high economic activities. But in fact, the phenomenon of urbanization has penetrated even mega-urbanization in the second tier cities in the country. This paper takes the case of Indonesia's secondary cities that are beginning to have an important role in moving the national economy and balancing regional development. The cities are Surabaya, Bandung, Medan, Semarang and Makassar. These cities are experiencing accelerated growth in demography, economic and physical. These growth spurt cause land requirements in cities are no longer able to be fulfilled so the urban activities began to spread to the surrounding areas. Urban areas is widening to suburban areas. National Population Censuses in the period 1990-2010 shows the rate of population growth in the secondary cities lower than their surrounding areas. This indicates that urban activities of secondary cities had passed the administrative boundaries of the city, merge with the surrounding area. This paper will describe the trends of urbanization that occurred in Indonesia's secondary cities using descriptive analytic approach through comparison of data from National Population Censuses 1990, 2000 and 2010. In general, the trends of urbanization in Indonesia's secondary cities shows a pattern that is the rate of population growth in urban area closely related to the size of the city.*

**Keywords:** *Trend, Urbanization, Secondary Cities, Surrounding Area, Population Growth*

#### **Abstrak**

Urbanisasi seringkali identik dengan kota utama di suatu negara sebagai lokasi terjadinya akumulasi kapital yang menjadi daya tarik tinggi berbagai aktivitas ekonomi. Namun pada kenyataannya, fenomena urbanisasi bahkan mega-urbanisasi telah merambah pada lapis kedua kota-kota di suatu negara. Tulisan ini mengambil kasus *secondary cities* (kota-kota lapis kedua) yang mulai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan menyeimbangkan pembangunan wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Kota-kota ini mengalami percepatan pertumbuhan, baik di bidang ekonomi, kependudukan, maupun fisik. Percepatan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan lahan terbangun kota-kota tersebut tidak mampu lagi terpenuhi sehingga aktivitas perkotaan mulai merambah ke wilayah sekelilingnya. Kawasan perkotaan semakin melebar ke wilayah pinggiran. Hasil Sensus Penduduk dalam kurun waktu 1990-2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota kedua lebih rendah dibandingkan dari wilayah di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan aktivitas perkotaan kota-kota kedua sudah melewati batas administrasi kota, menyatu dengan wilayah sekelilingnya. Tulisan ini akan menggambarkan tren urbanisasi yang terjadi pada kota kedua di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui perbandingan data hasil Sensus Penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010. Secara umum tren urbanisasi pada kota-kota kedua di Indonesia menunjukkan sebuah pola dimana laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan ukuran kota.

**Kata Kunci:** *Tren, Urbanisasi, Kota Kedua, Wilayah Sekeliling Kota, Pertumbuhan Penduduk*

---

<sup>1</sup> Makalah ini sudah dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Kependudukan dengan tema Kependudukan untuk Pembangunan Pasca 2015, Bandung 26-28 November 2014

## PENDAHULUAN

Beberapa dekade lalu, studi-studi mengenai urbanisasi, khususnya di Negara berkembang, terfokus pada kota-kota utama dari suatu Negara yang mengalami proses pengkotaan sangat cepat, membentuk kawasan perkotaan yang besar atau *megaurban* meninggalkan kota-kota lain di negaranya. Selain sebagai tempat konsentrasi penduduk, kota-kota tersebut memiliki kontribusi ekonomi yang sangat tinggi terhadap perekonomian nasional. Negara dengan kota utama (*primate city*) yang sangat menonjol diantaranya Indonesia (Jakarta), Thailand (Bangkok), Philippines (Manila), Mexico (Mexico City), and Hungary (Budapest). Hal ini membuat kota-kota lapis kedua atau ketiga di negara tersebut tidak menjadi perhatian khusus karena perannya yang dianggap sangat kecil.

Namun saat ini, peta urbanisasi mulai bergeser. Seperti yang disebutkan dalam Laporan United Nation 2014, bahwa aglomerasi perkotaan paling cepat terjadi pada kota menengah dan kota dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa yang berlokasi di Asia dan Afrika. Secara global, saat ini terdapat lebih dari 2400 kota di dunia dengan jumlah penduduk antara 150 ribu hingga 5 juta yang dapat didefinisikan sebagai *secondary cities*, yang selanjutnya disebut kota lapis kedua. Sekitar dua per tiga kota lapis kedua terletak di Afrika dan Asia (Roberts & Hohmann, 2014). Pergeseran ini menunjukkan bahwa saat ini kota lapis kedua memiliki peran penting sebagai katalis dan pusat kedua yang dapat menarik masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal. Kota lapis kedua berperan penting dalam memfasilitasi produksi lokal, transportasi, transfer barang, manusia, informasi dan jasa antar sub-nasional, metropolitan, nasional, regional dan sistem global kota-kota. Seperti yang diungkapkan oleh Satterthwaite & Tacoli (2003), kota kecil dan menengah potensial memiliki peran penting dalam menyeimbangkan wilayah dan pembangunan pedesaan jika direncanakan dan dikelola dengan baik dimana kota-kota tersebut dapat memainkan peran sebagai penghubung antara pembangunan kota dan desa. Untuk itu, studi ini penting dilakukan untuk melihat karakteristik urbanisasi pada kota lapis kedua.

Kota lapis kedua merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat atau level kedua dalam hirarki kota-kota dibawah kota utama. Beberapa negara bisa memiliki beberapa tingkat atau level dari kota-kotanya. Istilah kota lapis kedua pertama kali dipopulerkan oleh Rondinelli pada tahun 1970an. Rondinelli mengkarakteristikan kota lapis

kedua sebagai kota permukiman dengan populasi paling sedikit 100 ribu jiwa, tetapi definisi ini tidak mengikut sertakan kota terbesar pada negara tersebut. UN-Habitat mendefinisikan kota lapis kedua sebagai sebuah wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk 100 ribu hingga 500 ribu jiwa. Definisi didasarkan atas klasifikasi kota berkembang pada tahun 1950an. Selanjutnya pada tahun 2014, United Nation mendefinisikan kota lapis kedua memiliki jumlah penduduk antara 1 juta hingga 5 juta jiwa. Robert and Hohmann (2014) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori dari kota lapis kedua, (1) kota sub-nasional yang merupakan pusat dari pemerintah lokal, industri, pertanian, pariwisata dan pertambangan, (2) Kluster perkotaan yang diasosiasikan dengan perluasan, satelit dan kota baru yang mengelilingi kota metropolitan besar, dan (3) Koridor perdagangan ekonomi yang merupakan pusat pertumbuhan atau kutub yang direncanakan atau daerah terbangun sepanjang koridor transportasi utama.

Mengacu pada definisi-definisi terkait kota lapis kedua dan karakteristik kota-kota di Indonesia, maka definisi kota lapis kedua yang digunakan dalam studi ini adalah kota dengan jumlah penduduk antara 1 juta hingga 5 juta jiwa serta merupakan kluster perkotaan yang diasosiasikan dengan perluasan, satelit dan kota baru yang mengelilingi kota metropolitan besar. Untuk itu, kota-kota yang akan di studi lebih lanjut adalah Kota Surabaya dengan aglomerasi perkotaan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo and Lamongan serta Kota Mojokerto dan Surabaya), Bandung dengan aglomerasi perkotaan Bandung Metropolitan Region (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Sumedang), Medan dengan aglomerasi perkotaan Mebidangro (Kota Medan dan Binjai serta Kabupaten Deli Serdang dan Karo), Semarang dengan aglomerasi perkotaan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran (Semarang), Salatiga dan Purwudadi (Grobogan) serta Kota Semarang) dan Makassar dengan aglomerasi perkotaan Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa dan Takalar). Kelima kota kedua tersebut pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa dan memiliki aktivitas perkotaan yang sudah melebihi batas administrasi kotanya, teraglomerasi dengan wilayah sekelilingnya.

Studi ini membahas trend urbanisasi terutama aspek demografi pada kota lapis kedua di Indonesia dengan menggunakan data dari Sensus Penduduk Nasional tahun 1990, 2000 dan 2010. Tulisan ini terdiri dari empat bagian, bagian pertama pendahuluan, bagian kedua membahas perspektif teoritis tentang urbanisasi

dalam konteks kota kedua. Bagian ketiga berisi uraian mengenai pola urbanisasi kota lapis kedua di Indonesia dan bagian terakhir kesimpulan dari studi.

## URBANISASI DAN *SECONDARY CITIES*

Secara harfiah, definisi urbanisasi adalah proses pengkotaan suatu wilayah. Menurut Ningsih (2002), urbanisasi merupakan suatu gejala atau suatu proses yang sifatnya multisektoral yang dilihat dari sebab maupun akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu Firman, et al (2007) mendefinisikan urbanisasi sebagai sebuah transformasi dari pedesaan menjadi hidup dengan cara industri. Mengacu pada definisi ini, urbanisasi dianggap sebagai perubahan sosial ekonomi dunia yang paling fenomenal. Urbanisasi juga merupakan fenomena yang sangat kompleks, meliputi faktor sosial, ekonomi, politik, dan geografi. Namun studi ini akan fokus pada faktor demografi saja utamanya terkait dengan trend pertumbuhan penduduk dan proporsi penduduk perkotaannya.

Terkait dengan konsep urbanisasi, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yaitu mengenai perbedaan urbanisasi sendiri dengan pertumbuhan perkotaan (*urban growth*). *Urban growth* merupakan salah satu mekanisme untuk melihat urbanisasi melalui pertumbuhan alami penduduk perkotaan. *Urban growth* dapat dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu, sedangkan urbanisasi dilihat melalui perbandingan relatif jumlah penduduk perkotaan dengan jumlah total penduduk dari waktu ke waktu (Morrison, 1980). Terdapat tiga hal yang membentuk urbanisasi yaitu peningkatan jumlah penduduk alami, migrasi desa kota, dan klasifikasi ulang.

Seperti di kebanyakan negara berkembang di Asia,

urbanisasi di Indonesia dipicu oleh pembangunan ekonomi, terutama pada sektor industri dan jasa, yang cenderung berlokasi pada kota-kota besar. Perkembangan ini disebabkan oleh ketersediaan utilitas seperti ketersediaan air, listrik, pelabuhan dan bandar udara serta tempat konsentrasi tenaga kerja terampil dan pasar. Urbanisasi dan pembangunan ekonomi pada sebagian besar wilayah Indonesia didorong oleh investasi baik domestik maupun asing pada kawasan perkotaan besar. Pada tahun 1950, hanya Kota Jakarta yang memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. Tiga puluh tahun kemudian, pada tahun 1980 terdapat tiga kota baru yang memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, yaitu Surabaya, Bandung dan Medan. Selanjutnya pada tahun 1990, Semarang, Palembang dan Ujung Pandang (Makassar) memiliki jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. Dan pada tahun 2010, jumlah kota dengan populasi lebih dari satu juta jiwa menjadi sebelas dengan penambahan Kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Tangerang Selatan. Kota-kota yang disebut terakhir merupakan kota yang berkembang karena proses mega-urbanisasi dari Kota Jakarta, membentuk *megacities* Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dimana aktivitas perkotaan Jakarta sudah melimpah ke wilayah pinggirannya. Pembangunan fisik perkotaan melebar keluar kota dan batas metropolitan, memencar sepanjang jalan utama serta menyebar secara acak ke segala arah (McGee & Robinson, 1995).

Berdasarkan data-data di atas, proses mega-urbanisasi tidak hanya terjadi pada kota-kota utama dan daerah pinggirannya, tetapi juga terjadi pada kota-kota lapis keduanya. Pada tahun 1980, kota-kota lapis kedua mulai masuk dalam tempo percepatan kegiatan ekonomi di ibukota (Rimmer & Dick, 2009). Secara bertahap, kota lapis kedua masuk ke dalam koneksi



Gambar 1. Kota-kota Kedua di Indonesia

internasional, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Perluasan pembangunan fisik perkotaan juga terjadi pada kota-kota lapis kedua, misalnya Surabaya. Pada tahun 1970an industrialisasi mulai masuk ke Surabaya dan Jawa Timur, pada tahun 2000 jumlah penduduk tercatat Kota Surabaya hanya 2,6 juta tetapi mendekati 8 juta jika dihitung dengan wilayah sekelilingnya. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada kota lapis kedua lainnya.

Para akademisi telah menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan urbanisasi. Cohen (2006) misalnya, mengungkapkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan kota disebabkan oleh alasan beragam terkait dengan migrasi desa kota, peningkatan populasi alami dan penggabungan. Selanjutnya, Erickcek & McKinney (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan kawasan metropolitan bergantung pada struktur ekonominya, sumber daya manusia, faktor kualitas hidup, trend sejarah dan lokasi. Lebih jauh, urbanisasi juga berkaitan integral dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan proteksi lingkungan (United Nation, 2014).

Sementara itu, Webster (2011) menunjukkan bahwa pendorong perubahan di wilayah peri-urban sebagai perluasan pembangunan perkotaan, termasuk pendorong industri dan non-industri. Webster menekankan bahwa dalam mendefinisikan penggerak urbanisasi, dua kekuatan harus dipertimbangkan: kekuatan sentripetal (penggerak dari dalam) dan sentrifugal (penggerak dari luar) dalam sebuah perluasan wilayah perkotaan. Kekuatan sentrifugal pada beberapa negara dengan pendapatan menengah meliputi investasi manufaktur, pembangunan cepat dari *expressways* dan pasar lahan perkotaan, dimana harga lahan perkotaan lebih rendah di wilayah pinggiran. Preferensi budaya juga memainkan peran dalam arti bahwa orang dengan pendapatan tinggi berharap dapat hidup di wilayah pinggiran, seperti yang ditemukan di Amerika Utara dan Australia meskipun terdapat penawaran perumahan dekat dengan kota inti. Sementara kekuatan sentripetal mungkin berhubungan dengan struktur ekonomi yang mendorong urbanisasi. Hal ini dapat meliputi sektor tertentu, seperti jasa yang cenderung terkonsentrasi pada area spesifik. Meskipun demikian, faktor budaya dan keterbatasan pilihan dapat juga memainkan peran dengan cara yang sama sebagai kekuatan sentrifugal. Goldblum & Wong (2000) menemukan bahwa aktivitas spekulatif juga dapat dianggap sebagai faktor dari perubahan kota.

## **POLA URBANISASI PADA KOTA LAPIS KEDUA DI INDONESIA**

Pada dasarnya kota lapis kedua di Indonesia memiliki fungsi menengah yang nyata dalam kebijakan pembangunan antara pusat (Jakarta sebagai pusat pemerintahan) dengan permukiman regional terkait aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, dan modernisasi umum (Atmodiriono dan Osborn dalam Rondinelli, 1983). Kota lapis kedua berfungsi sebagai intermediasi dalam aliran kekuatan, inovasi, manusia, dan sumberdaya agar tidak mengumpul hanya pada satu lokasi. Secara relatif, bagaimanapun kota lapis kedua tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kota dengan kategori lebih besar atau lebih kecil (Rondinelli, 1983).

### ***Pertumbuhan Penduduk Kota Kedua***

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun pada kota lapis kedua periode tahun 1990 dan 2000 sangat rendah berkisar antara 0,38% (di Bandung) sampai 1,65% (di Makassar). Kota Surabaya memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sedikit lebih tinggi dari Bandung (0,49%), Semarang dan Medan berada di atasnya, yaitu 0,78% dan 1,01%. Berdasarkan persentase tersebut, hanya Kota Makassar yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional (1,35%). Dari sisi jumlah penduduk, pada tahun 1990, Kota Makassar merupakan kota kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk paling kecil (944.372 jiwa) sementara kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Surabaya (2.473.272 jiwa). Kota Bandung (2.058.122 jiwa) berada di urutan kedua, Medan (1.730.052 jiwa) di urutan ketiga dan Kota Semarang (1.249.230 jiwa) di urutan ke-empat. Sepuluh tahun selanjutnya, pada tahun 2010, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk masing-masing kota seperti yang disebutkan sebelumnya, urutan besaran jumlah penduduk kota kedua tidak berubah.

Tabel 1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun *Secondary Cities* di Indonesia

No	Kota Kedua	1990		2000		2010
		Populasi	Rate 1990-2000 (%)	Populasi	Rate 2000-2010 (%)	Populasi
1	Surabaya	2.473.272	0,49	2.595.359	<b>0,66</b>	2.765.908
2	Bandung	2.058.122	<b>0,38</b>	2.136.260	1,21	2.394.873
3	Medan	1.730.052	1,01	1.904.104	1,08	2.109.339
4	Semarang	1.249.230	0,78	1.346.813	1,54	1.553.778
5	Makassar	944.372	<b>1,65</b>	1.100.019	<b>2,18</b>	1.339.374

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000 dan 2010

Untuk periode tahun 2000 hingga 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi masih dimiliki oleh Kota Makassar (2,18%) dan terendah adalah Kota Surabaya (0,66%). Kota Bandung yang pada periode sebelumnya (tahun 1990-2000) memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah, pada periode ini berada di urutan ketiga (1,21%) di bawah Kota Semarang (1,54%). Sementara Kota Medan memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,08%. Pada periode ini juga terdapat dua kota yang memiliki laju di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,49%, yaitu Kota Semarang dan Kota Makassar. Perbedaan pertumbuhan penduduk di kota-kota ini atau proses urbanisasi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi pada kota-kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dengan urbanisasi dimana urbanisasi seringkali diasosiasikan dengan level pembangunan ekonomi suatu negara (Firman, 2014). Wilayah dengan level pembangunan ekonomi tinggi cenderung juga memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi.

Tabel 2. PDRB *Secondary Cities* Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

Kota Kedua	2006	2007	2008	2009	2010
Surabaya	68.817	73.160	77.718	82.015	87.829
Bandung	23.043	24.942	26.979	29.228	31.697
Medan	27.234	29.353	31.374	33.430	35.822
Semarang	17.119	18.143	19.157	20.181	21.366
Makassar	11.342	12.261	13.552	14.798	16.252

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010, BPS.

Kota Makassar dengan jumlah penduduk paling rendah memiliki produk domestik regional bruto

(PDRB) paling rendah diantara kota lapis kedua yang lain. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa secara umum semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu kota semakin tinggi aktivitas perekonomiannya. Namun terjadi anomali pada Kota Bandung dan Medan, dimana Kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kota Medan namun PDRBnya lebih rendah. Jika dilihat dari PDRB berdasarkan lapangan usaha (9 sektor) masing-masing kota periode 2006-2010, Kota Bandung memiliki nilai PDRB lebih tinggi pada tiga sektor yaitu industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara Kota Medan unggul pada enam sektor lainnya. Keberadaan pelabuhan Balawan menyumbang nilai tambah yang sangat besar bagi pendapatan regional Kota Medan, seperti pada tahun 2010, sektor pengangkutan dan telekomunikasi Kota Medan mencapai 7 triliun, sementara sektor yang sama di Kota Bandung hanya menyumbang sekitar 3,5 triliun (Kota Medan dan Kota Bandung Dalam Angka 2007-2011).

Sementara itu, jika pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kota lapis kedua relatif rendah dibandingkan laju pertumbuhan Nasional. Berbeda halnya dengan wilayah sekelilingnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada sebagian besar wilayah di pinggiran kota lapis kedua lebih tinggi dibandingkan dengan kota inti. Sebagai contoh, pada periode tahun 1990-2000 Kabupaten Gresik yang berbatasan dengan Surabaya memiliki laju pertumbuhan penduduk 1,74% per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten dan kota lain di sekeliling Kota Surabaya, pertumbuhan penduduk per

tahunnya lebih tinggi, yakni Kabupaten Bangkalan 0,72%, Kota Mojokerto 0,91%, Kabupaten Mojokerto 1,54%, and Kabupaten Sidoarjo 3,39%. Kabupaten Lamongan satu-satunya kabupaten di sekeliling Kota Surabaya yang memiliki pertumbuhan penduduk lebih rendah dari Kota Surabaya (0,34%). Hal ini terjadi mengingat Kabupaten Lamongan terletak paling jauh dari Kota Surabaya dimana kegiatan industri belum berkembang seperti di Kabupaten lainnya. Guna lahan Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh lahan tidak terbangun, baik sawah, hutan atau tegalan.

Begitu juga dengan Kabupaten Bandung (Kabupaten Bandung Barat terbentuk tahun 2007) dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung, memiliki laju pertumbuhan penduduk 2,97% dan 1,63% pertahun, lebih tinggi dari laju Kota Bandung (0,82%). Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemui di Kota Binjai, kota mandiri yang terletak di sekitar Kota Medan memiliki pertumbuhan penduduk 1,76% per tahun lebih tinggi dari Kota Medan (1,10%). Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertumbuhan dua kali lipa laju Kota Medan. Sementara Kabupaten Karo, laju

pertumbuhannya lebih rendah sedikit dari Kota Medan yaitu 1,00%. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Karo juga terletak paling jauh dari Kota Medan dimana aktivitas perkotaan masih belum berkembang seperti pada wilayah lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Selanjutnya, Kota Semarang dan sekitarnya, hanya Kabupaten Demak yang memiliki pertumbuhan penduduk di atas Kota Semarang, sementara kabupaten lainnya laju pertumbuhan penduduknya masih rendah. Mamas et al (2001) dalam Firman (2003) mengungkapkan bahwa, alasan utama dari rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang adalah karena batas administrasi Kota Semarang yang sangat luas, jika dibandingkan luas Kota Semarang dua kali luas Kota Bandung. Kota Semarang sangat luas dibandingkan kota-kota besar di Jawa.

Namun terdapat hal menarik untuk dicermati, berbeda dengan kota lapis kedua lainnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, kecuali jika dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Laju pertumbuhan

Tabel 3. Populasi pada *Secondary Cities* di Indonesia

No.	Secondary Cities and Surrounding Area	1990		2000		2010	
		Population	Rate 1990-2000 (%)	Population	Rate 2000-2010 (%)	Population	Rate 1990-2010 (%)
1	<b><i>Gerbangkertosusila (Surabaya Metropolitan Area)</i></b>						
	<b>Surabaya City</b>	<b>2,473,272</b>	<b>0.49</b>	<b>2,595,359</b>	<b>0.66</b>	<b>2,765,908</b>	<b>0.59</b>
	Gresik Regency	856,430	1.74	1,005,445	1.71	1,177,201	1.87
	Bangkalan Regency	750,740	0.72	805,048	1.27	907,255	1.04
	Mojokerto City	99,707	0.91	108,814	1.04	120,132	1.02
	Mojokerto Regency	786,943	1.54	908,004	1.27	1,023,526	1.50
	Sidoarjo Regency	1,166,972	3.39	1,563,015	2.45	1,945,252	3.33
	Lamongan Regency	1,143,344	0.34	1,181,660	-0.02	1,179,770	0.16
2	<b><i>Bandung Metropolitan Area</i></b>						
	<b>Bandung City</b>	<b>2,058,122</b>	<b>0.38</b>	<b>2,136,260</b>	<b>1.21</b>	<b>2,394,873</b>	<b>0.82</b>
	Cimahi City					541,139	
	Bandung and West Bandung Regency	3,201,332	2.97	4,151,894	1.29	4,688,133	2.32
	Sumedang Regency	831,809	1.63	967,580	1.28	1,091,323	1.56
3	<b><i>Mebidangro (Medan Metropolitan Area)</i></b>						
	<b>Medan City</b>	<b>1,730,052</b>	<b>1.01</b>	<b>1,904,104</b>	<b>1.08</b>	<b>2,109,339</b>	<b>1.10</b>
	Binjai City	181,866	1.75	213,725	1.51	246,010	1.76
	Deli Serdang Regency	1,602,149	2.23	1,959,230	-0.87	1,789,243	0.58
	Karo Regency	257,981	1.00	283,713	2.35	350,479	1.79
4	<b><i>Kedungsepur (Semarang Metropolitan Area)</i></b>						
	<b>Semarang City</b>	<b>1,249,230</b>	<b>0.78</b>	<b>1,346,813</b>	<b>1.54</b>	<b>1,553,778</b>	<b>1.22</b>
	Kendal Regency	798,976	0.64	849,729	0.60	900,611	0.64
	Demak Regency	822,781	1.83	973,674	0.88	1,058,938	1.44
	Ungaran (Semarang Regency)	785,799	0.60	833,181	1.17	931,041	0.92
	Salatiga City	98,012	5.44	151,326	1.30	171,067	3.73
	Purwodadi (Grobogan Regency)	1,148,174	1.05	1,268,234	0.32	1,308,592	0.70
5	<b><i>Mamminasata (Makassar Metropolitan Area)</i></b>						
	<b>Makassar City</b>	<b>944,372</b>	<b>1.65</b>	<b>1,100,019</b>	<b>2.18</b>	<b>1,339,374</b>	<b>2.09</b>
	Maros Regency	239,725	1.35	272,116	1.69	318,238	1.64
	Sungguminasa (Gowa Regency)	429,157	1.95	512,876	2.72	652,329	2.60
	Takalar Regency	206,089	1.15	229,718	1.72	269,171	1.53

Sumber: diolah dari National Population Censuses 1990, 2000 and 2010

penduduk Kabupaten Gowa adalah 1,95% lebih tinggi dari Kota Makassar (1,65%). Kota Makassar merupakan satu-satunya kota lapis kedua pada studi ini dengan jumlah penduduk di bawah dua juta jiwa sehingga besar kemungkinan bahwa Kota Makassar masih berada dalam tahap perkembangan tinggi, lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, dimana aktivitasnya belum melimpah ke luar batas administrasi.

Sedangkan untuk periode tahun 2000-2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun pada kota lapis kedua mengalami sedikit perubahan, dimana kota dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Surabaya (0,66%), sementara Bandung yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah pada periode sebelumnya berada pada posisi terendah ketiga. Laju pertumbuhan tertinggi tetap berada di Kota Makassar (2,18%) yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya kecuali Kabupaten Gowa. Seperti yang terjadi pada periode tahun 1990-2000, untuk Kota Surabaya, Bandung dan Medan rata-rata laju pertumbuhan penduduk wilayah (kabupaten/kota) sekitarnya lebih tinggi.

Pada periode ini, hal yang berbeda terjadi di Kawasan Perkotaan Semarang, dimana rata-rata laju pertumbuhannya lebih tinggi dari semua wilayah sekelilingnya. Kabupaten Demak dan Kota Salatiga yang pada periode sebelumnya memiliki laju lebih tinggi, pada periode ini lajunya turun cukup signifikan, yaitu dari 1,83% ke 0,88% dan dari 5,44% ke 1,30%. Beberapa studi menunjukkan terjadi migrasi usia produktif yang cukup besar dari Kabupaten Demak dan wilayah lain di sekitarnya menuju ke kota yang lebih besar. Studi dari (Putra, 2010) mengungkapkan bahwa pertumbuhan total pelajar di Kota Demak semakin menurun tiap tahunnya. Begitu juga dengan data dari Demak Dalam Angka yang menunjukkan migrasi cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya terutama dalam kurun waktu 2006-2010.

Secara ringkas, pola laju pertumbuhan penduduk di kota lapis kedua pada periode 1990-2000 memperlihatkan bahwa masing-masing kota lapis kedua memiliki trend pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda. Secara umum, jumlah penduduk pada kota lapis kedua terus meningkat dengan laju yang lebih rendah dibandingkan rata-rata laju nasional dan wilayah sekelilingnya. Pada wilayah pinggiran tumbuh berbagai aktivitas ekonomi yang masih berhubungan erat dengan kota inti, terutama kegiatan industri dan perumahan skala besar. Penghuni perumahan skala besar pada daerah pinggiran merupakan pekerja dari kota inti yang melakukan

penglaju, seperti yang Firman, (1998) sebutkan bahwa salah satu ciri dari kawasan perkotaan besar (*mega urban*) adalah adanya pertumbuhan penglaju (*commuters*) dan peningkatan waktu bagi para penglaju. Tingginya harga lahan di kota inti, membuat kegiatan industri bergeser ke wilayah pinggiran. Jones, et.al, (1999) menyebut proses ini sebagai “metropolitan turnaround”, yaitu penurunan laju pertumbuhan penduduk pada kota inti seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan dalam beberapa hal Kota Semarang dan Makassar.

### ***Tingkat Urbanisasi Pada Kota Kedua Di Indonesia***

Tingkat urbanisasi suatu wilayah dilihat dari proporsi penduduk perkotaan (*urban population*) terhadap penduduk keseluruhan. Mengacu kepada Gardiner & Gardiner (2006) dalam konteks Indonesia, terdapat dua definisi tentang kota, yaitu pertama kota administratif dimana suatu wilayah (kota) memiliki status perkotaan resmi (kota otonom) dan kedua, kota secara fungsional, dimana sebuah desa dapat didefinisikan sebagai kota sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksud yaitu (1) kepadatan penduduk; (2) persentase permukiman terhadap sektor pertanian; (3) fasilitas perkotaan dan aksesibilitas kawasan (BPS, 2011). Badan Pusat Statistik menggunakan teknik *scoring* dalam menentukan klasifikasi *urban* (perkotaan) dan *rural* (perdesaan). Skor yang digunakan berkisar dari 1 sampai 8 untuk kepadatan penduduk dan persentase pertanian terhadap permukiman. Untuk kepadatan penduduk, skor 1 untuk kepadatan penduduk kurang dari 500 orang per kilometer dan 8 untuk kepadatan lebih besar dari 8.500 orang per kilometer. Untuk persentase pertanian terhadap permukiman, skor 1 untuk persentase lebih dari 70% dan 8 untuk persentase di bawah 5%. Sementara skor untuk akses terhadap fasilitas publik adalah 0 atau 1. Contohnya, fasilitas sekolah, skor 1 jika fasilitas sekolah tersedia dengan jarak kurang dari 2,5 kilometer dan sebaliknya, 0 jika tidak tersedia sekolah atau jaraknya lebih dari 2,5 kilometer. Untuk fasilitas pasar dan toko, skor 1 jika fasilitas tersebut tersedia dengan jarak kurang dari 2 kilometer. Sementara untuk fasilitas bioskop dan fasilitas kesehatan, skor 1 untuk ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut dengan jarak kurang dari 5 kilometer.

Secara agregat, jumlah penduduk perkotaan terbesar pada tahun 1990 dan 2000 dimiliki oleh Kawasan Perkotaan Surabaya, sementara pada tahun 2010, jumlah perkotaan terbesar bergeser ke Kawasan Perkotaan Bandung. Namun jika dilihat masing-masing kota lapis kedua, jumlah penduduk tertinggi

masih Kota Surabaya. Hal ini tidak terlepas dari pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kota Cimahi pada tahun 2001 dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Perubahan status administratif Kota Cimahi secara langsung menambah jumlah penduduk perkotaan di Kawasan Perkotaan Bandung, begitu juga dengan pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang membuat dibangunnya fasilitas perkotaan sehingga mengubah status beberapa desa atau kecamatan menjadi bagian dari kawasan perkotaan.

Pertumbuhan penduduk perkotaan memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara periode tahun 1990-2000 dan 2000-2010. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan di wilayah pinggiran kota lapis kedua (*peripheral area*), karena sebagai kota otonom, kota-kota inti sudah memiliki penduduk perkotaan 100%. Pada periode 1990-2000, wilayah pinggiran mengalami pertumbuhan yang

fantastis, bahkan tidak sedikit yang meningkat di atas 100%. Sementara untuk periode 2000-2010 pertumbuhan yang dialami tidak setinggi periode sebelumnya. Seperti yang terlihat pada Tabel 4, pada periode 1990-2000, kawasan perkotaan yang mengalami kenaikan jumlah penduduk perkotaan tertinggi adalah kawasan perkotaan Bandung (46,93%) disusul Surabaya (40,63%), Semarang (37, 87%), Medan (26,19%) dan Makassar (24,55%). Hal ini mengindikasikan pertumbuhan daerah perkotaan paling pesat di Kawasan Perkotaan Bandung dan Surabaya sebagai dampak dari industrialisasi yang masif. Pertumbuhan investasi cukup tinggi baik dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2000 investasi yang masuk ke Kawasan Perkotaan Surabaya mencapai lebih dari \$200 juta dan satu triliun rupiah. Sementara perkembangan Kota Bandung, tidak lepas dari perkembangan Kota Jakarta, dimana antara Kota Jakarta dan Bandung, seperti yang dikatakan Firman (2009), telah terbangun sabuk perkotaan (*urban belt*)

Tabel 4. Tingkat Urbanisasi *Secondary Cities* di Indonesia

	Secondary Cities and Surrounding Area	1990		Rate 1990-2000 (%)	2000		Rate 2000-2010 (%)	2010	
		Urban Population	Share (%)		Urban Population	Share (%)		Population	Share (%)
1	<b><i>Gerbangkertosusila (Surabaya Metropolitan Area)</i></b>								
	<b>Surabaya City</b>	<b>2.473.272</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>2.595.359</b>	<b>100,00</b>	<b>6,57</b>	<b>2.765.908</b>	<b>100,00</b>
	Gresik Regency	221.180	25,83	<b>126,49</b>	500.960	49,82	40,51	703.912	59,80
	Bangkalan Regency	109.546	14,59	<b>58,44</b>	173.566	21,56	23,80	214.875	23,68
	Mojokerto City	99.707	100,00	<b>9,13</b>	108.814	100,00	10,40	120.132	100,00
	Mojokerto Regency	170.483	21,66	<b>122,89</b>	379.984	41,85	30,37	495.402	48,40
	Sidoarjo Regency	586.107	50,22	<b>128,51</b>	1.339.311	85,69	32,31	1.772.043	91,10
	Lamongan Regency	103.435	9,05	<b>88,64</b>	195.122	16,51	25,38	244.642	20,74
	<b>Surabaya Metropolitan Area</b>	<b>3.763.730</b>	<b>51,72</b>	<b>40,63</b>	<b>5.293.116</b>	<b>64,81</b>	<b>19,34</b>	<b>6.316.914</b>	<b>69,27</b>
2	<b><i>Bandung Metropolitan Area</i></b>								
	<b>Bandung City</b>	<b>2.058.122</b>	<b>100,00</b>	<b>3,80</b>	<b>2.136.260</b>	<b>100,00</b>	<b>12,11</b>	<b>2.394.873</b>	<b>100,00</b>
	Cimahi City							541.139	100,00
	Bandung and West Bandung Regency	1.291.873	40,35	105,64	2.656.546	63,98	35,98	3.612.277	77,05
	Sumedang Regency	113.321	13,62	161,16	295.953	30,59	56,30	462.560	42,39
	<b>Bandung Metropolitan Area</b>	<b>3.463.316</b>	<b>56,86</b>	<b>46,93</b>	<b>5.088.759</b>	<b>70,13</b>	<b>37,77</b>	<b>7.010.849</b>	<b>80,44</b>
3	<b><i>Mebidang (Medan Metropolitan Area)</i></b>								
	<b>Medan City</b>	<b>1.730.052</b>	<b>100,00</b>	<b>10,06</b>	<b>1.904.104</b>	<b>100,00</b>	<b>10,78</b>	<b>2.109.339</b>	<b>100,00</b>
	Binjai City	181.866	100,00	17,52	213.725	100,00	15,11	246.010	100,00
	Deli Serdang Regency	596.933	37,26	74,36	1.040.794	53,12	30,27	1.355.844	75,78
	Karo Regency	46.562	18,05	41,76	66.005	23,26	37,49	90.748	25,89
	<b>Medan Metropolitan Area</b>	<b>2.555.413</b>	<b>67,75</b>	<b>26,19</b>	<b>3.224.628</b>	<b>73,95</b>	<b>17,90</b>	<b>3.801.941</b>	<b>84,58</b>
4	<b><i>Kedungsepur (Semarang Metropolitan Area)</i></b>								
	<b>Semarang City</b>	<b>1.249.230</b>	<b>100,00</b>	<b>7,81</b>	<b>1.346.813</b>	<b>100,00</b>	<b>15,37</b>	<b>1.553.778</b>	<b>100,00</b>
	Kendal Regency	165.606	20,73	115,27	356.508	41,96	21,14	431.865	47,95
	Demak Regency	92.227	11,21	189,48	266.976	27,42	48,89	397.498	37,54
	Ungaran (Semarang Regency)	139.997	17,82	94,11	271.755	32,62	36,58	371.157	39,86
	Salatiga City	98.012	100,00	54,40	151.326	100,00	13,05	171.067	100,00
	Purwodadi (Grobogan Regency)	122.805	10,70	48,14	181.925	14,34	17,92	214.529	16,39
	<b>Semarang Metropolitan Area</b>	<b>1.867.877</b>	<b>38,10</b>	<b>37,87</b>	<b>2.575.303</b>	<b>47,49</b>	<b>21,92</b>	<b>3.139.894</b>	<b>53,00</b>
5	<b><i>Mamminasata (Makassar Metropolitan Area)</i></b>								
	<b>Makassar City</b>	<b>944.372</b>	<b>100,00</b>	<b>16,48</b>	<b>1.100.019</b>	<b>100,00</b>	<b>21,76</b>	<b>1.339.374</b>	<b>100,00</b>
	Maros Regency	27.451	11,45	87,38	51.438	18,90	<b>96,16</b>	100.900	31,71
	Sungguminasa (Gowa Regency)	64.114	14,94	113,56	136.925	26,70	<b>68,65</b>	230.924	35,40
	Takalar Regency	24.328	11,80	32,10	32.137	13,99	<b>76,85</b>	56.834	21,11
	<b>Makassar Metropolitan Area</b>	<b>1.060.265</b>	<b>58,28</b>	<b>24,55</b>	<b>1.320.519</b>	<b>62,44</b>	<b>30,86</b>	<b>1.728.032</b>	<b>67,00</b>

Sumber: diolah dari National Population Censuses 1990, 2000 and 2010

sepanjang 200 km. Limbangan aktivitas perkotaan Jakarta sudah mencapai Kota Bandung sejak tahun 1980an.

Pada periode berikutnya, tahun 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk perkotaan di kawasan perkotaan kota kedua melambat, kecuali untuk Kota Makassar. Pertumbuhan tertinggi masih berada di Kawasan Perkotaan Bandung dan selanjutnya Kota Makassar. Kota Makassar menjadi menarik karena selain karena satu-satunya kawasan perkotaan dengan pertumbuhan yang meningkat, kawasan perkotaan ini juga merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk perkotaan yang paling kecil dengan kecepatan tumbuh tinggi. Kondisi ini juga terkait dengan proporsi penduduk perkotaan pada masing-masing wilayah (*urban share*), dimana *urban share* wilayah pinggiran Kawasan perkotaan Makassar masih rendah dibandingkan dengan kawasan perkotaan lain (lihat Tabel 4). Kondisi ini tidak terlepas dari struktur ekonomi dari wilayah yang menjadi bagian dari kawasan perkotaan Makassar, dimana proporsi sektor pertanian masih cukup besar. Sejarah pembangunan pada negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dapat terjadi hanya ketika struktur ekonomi suatu wilayah bergeser dari sektor pertanian (primer) menuju sektor sekunder atau tersier (Lo and Salih, 1987 dalam Firman, 2007).

Jika dilihat trend perkembangan kota lapis kedua di Indonesia sampai saat ini, perkembangannya menyerupai perkembangan kota utama. Namun dibandingkan dengan kota utama, kota lapis kedua memiliki beragam tantangan yang membuatnya sulit untuk mampu mengejar kota utama. Berbagai keunggulan dimiliki oleh kota utama, terutama dari segi kebijakan pembangunan terutama terkait dengan kebijakan tingkat pelayanan fasilitas perkotaan. Kota utama pasti memiliki semua fasilitas utama suatu negara. Selain “bersaing” dengan kota utama, kota lapis kedua juga harus bersaing dengan sesama kota lapis kedua lainnya dalam mendapatkan fasilitas yang umumnya disebar oleh negara. Untuk itu kota lapis kedua membutuhkan spesialisasi dalam perkembangannya sehingga mampu bertahan dan berkembang mengimbangi perkembangan kota utama.

## KESIMPULAN

Jumlah penduduk pada kota-kota lapis kedua terus meningkat, namun rata-rata laju pertumbuhan per tahunnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Nasional serta dengan wilayah (kabupaten/kota) sekitarnya. Wilayah

pinggiran tumbuh lebih cepat sebagai luapan aktivitas ekonomi dari kota utama membentuk kawasan perkotaan yang luas melewati batas administrasi. Jumlah penduduk perkotaan juga terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya semakin melambat. Pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2000-2010, meskipun demikian urbanisasi merupakan suatu proses yang terjadi beriringan dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sehingga cenderung akan terus terjadi.

Fenomena yang terjadi pada kota lapis kedua ini sudah terjadi terlebih dahulu pada Kota Jakarta sebagai kota utama, seperti yang dijelaskan oleh Firman, dkk. (2007), pertumbuhan cepat pada daerah pinggiran Jakarta mengalami percepatan pertumbuhan sejak tahun 1980. Namun pertumbuhan kota lapis kedua sulit untuk bisa menyamai pertumbuhan dari kota utama karena perbedaan kekuatan politik yang dimiliki. Ibukota negara memiliki keuntungan sebagai satu-satunya kota nasional dalam konteks politik dan administrasi serta dihubungkan dengan tingkatan jasa pelayanan yang lebih tinggi, seperti bandara internasional, bank, dan bursa saham. Kota lapis kedua atau kota lapis ketiga perlu berkompetisi dengan kota lainnya untuk mendapatkan pengakuan dan sumber daya. Kasus kota lapis kedua, dapat menjadi pelajaran bagi kota-kota lain yang saat ini masih belum termasuk ke dalam definisi kota kedua, terutama berkaitan dengan prediksi ke depan menjadi kawasan metropolitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agency, C. S. 2010. *Indonesia's Population by Province and Regency/City. Results of Population Census 2010*. Jakarta: Central Statistic Agency.
- BPS. 1990. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- BPS. 2000. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.
- Cohen, B. 2006. Urbanization in Developing Countries: current trends, future projections, and key challenges for sustainability. *Technology in Society*, 63-80.
- Erickcek, G., & McKinney, H. 2006. Small cities blues: looking for growth factors in small and medium sized cities. *Economic Development Quarterly*, 232-258.

- Firman, T. 2003. The Spatial Pattern of Population Growth in Java, 1990-2000: Continuity and Change in Extended Metropolitan Region Formation. *International Development Planning Review* 25(1) , 53-66.
- Firman, T. 1998. Urban Restructuring in Jakarta Metropolitan Area: A Phenomenon of Global City in Asia. *Cities* 15(4) , 229-224
- Firman, T., Kombaitan, B., & Pradono. 2007. The Dynamics of Indonesia's Urbanization 1980-2006. *Urban Policy and Research* , 433-454.
- Gardiner, P., & Gardiner, M. 2006. Ecology of Population Dynamic in Indonesian Metropolitan Areas. *Unpublished Paper* .
- Goldblum, C., & Wong, T. 2000. Growth, crisis and spatial change: a study of haphazard urbanization in Jakarta, Indonesia. *Land Use Policy* , 29-37.
- Jones, G., Tsay, C., & Bajracharya, B. 1999. *Demography and Employment Change in Megacities of South East and East Asia*. Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University.
- McGee, T., & Robinson, I. 1995. *The Mega-Urban Region of Southeast Asia*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Morrison, P. 1980. *Population Movements: Their Forms and Function in Urbanization and Development*. Belgium: Liege: IUSSP.
- Ningsih, S. 2002. Urbanisasi dan Kaitannya dengan Hukum dan Kependudukan.
- Putra, D. P. 2010. *Book House di Kota Demak*. Semarang: Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Rimmer, P. J., & Dick, H. 2009. *The City in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press, National University of Singapore.
- Roberts, B., & Hohmann, R . P. 2014. *The System of Secondary Cities: The Neglected Drivers of Urbanising Economies*. Uganda: CIVIS.
- Satterthwaite, D., & Tacoli, C. 2003. *The Urban Part of Rural Development: The Role of Small and Intermediate Urban Centers in Regional Development and Poverty Reduction*. Londong: International Institute for Environment and Development (IIED).
- United Nation. 2014. *World Urbanization Prospect: The 2014 Revision*. New York: Uniten Nation.
- Webster, D. 2011. The future of peri-urbanization in developing countries: Colliding transnational and local forces. *Unpublished paper* .